

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERTIB SOSIAL
DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**

(Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 tahun 2018)



SKRIPSI

Oleh :

ALVIAN KURNIAWAN

NIM. 0203181014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN SIYASAH

2022 M / 1442H

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERTIB SOSIAL
DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**

(Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 tahun 2018)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

ALVIAN KURNIAWAN

NIM. 0203181014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN SIYASAH

2022 M / 1442H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALVIAN KURNIAWAN
NIM : 0203181014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Siyasah
Judul skripsi : Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Tertib Sosial Ditinjau dari Fiqih Siyasah (Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 25 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Alvian Kurniawan
NIM. 0203181014

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERTIB SOSIAL
DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**

(Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 tahun 2018)


SKRIPSI

Oleh:

**ALVIAN KURNIAWAN
NIM.0203181014**

Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. Fatimah, S.Ag. M.A
NIP. 19710320 199703 2 003

PEMBIMBING II


Zaid Alfauza Marpaung, MH
NIP. 19880824 201503 1 004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa**


Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Tertib Sosial Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 25 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Medan, 25 Agustus 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua

Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1102

Sekretaris

Syofiaty Lubis, MH
NIP. 19740127 200901 2002

Anggota – Anggota

Dr. Fatmah, S.Ag. M.A
NIP. 19710320 1199703 003

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 19591915 199703 2001

Zaid Alfauza Marpaung, MH
NIP. 19880824 201503 1004

Saugkot Azhar Rambe, S.HI., M.Hum
NIP. 19780504 200901 1000

SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag
NIP. 19760216 200212 1002

IKHTISAR

Nama: Alvian Kurniawan. NIM: 0203181014. Judul: **“PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERTIB SOSIAL DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 tahun 2018)”**. Fenomena pelacuran, tindak asusila, dan perselingkuhan merupakan tindakan kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani banyak ditemukan di pemerintahan kabupaten Asahan, walaupun Adanya Peraturan Daerah guna pencegahan dan pemberantasan tindak penyakit masyarakat, pencegahann dan pemberantasan tindak asusila perlu adanya peranan dalam penegakan Peraturan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Penyidik Pegawai sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Hambatan yang timbul dalam melakukan penegakkan Tertib Sosial, Untuk Mengetahui Pandangan Fiqh SiyasaH dalam melakukan Penegakan Hukum Tertib Sosial (pelacuran, tindak asusila dan perselingkuhan). Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan dengan kondisi lapangan, dengan menggunakan deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan teori-teori objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan masih belum mengoptimalkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan penegakkan tertib sosial saat razia penyakit masyarakat (Pekat). Penyidik juga memiliki hambatan dalam melakukan penyidikan karena sedikit jumlah penyididik di Satuan Polisi Pamong Praja, kekurangan dana dalam penanganan pelanggaran perda, masih adanya oknum pejabat yang melindungi tempat tempat yang pelanggaran tindak asusila untuk kepentingan pribadi. Saran dalam penelitian ini Kepada penyidik pegawai negeri sipil Satpol PP diharapkan untuk merekomendasi melalui Kepala Satpol PP kepada Pemerintahan Derah kabupaten Asahan dalam Menyusun PerBud terkait dengan penjelasan teknis dalam penyidikan pelanggaran ruang lingkup tertib sosial.

Kata Kunci : Peran, PPNS Satpol PP, Tertib Sosial, Fiqh SiyasaH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, khususnya pedapa penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul : **“PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERTIB SOSIAL DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH (Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 tahun 2018)”**. Sholawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya dan suri tauladan bagi seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam penulisan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU), Bapak Rektor. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Irwansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
4. Ibunda Sofiaty Lubis, MH, selaku Sekretaris jurusan yang telah memberi arahan dan dukungan kepada penulis.
5. Ibunda Dr. Fatimah, S.Ag., M.A. selaku pembimbing skripsi I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
6. Bapak Zaid Alfauza Marpaung, M.H selaku pembimbing skripsi II yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
7. Kedua orangtua saya, ayahanda Salim dan Ibunda Eko Setiawati, yang telah mendidik dan mengasuh penulis dari kandungan sampai sekarang, kakak Nina Astria, Adik Aldi Indrawan serta Adik Irma Novita Sari yang tidak pernah berhenti memberikan kasih dan sayangnya dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun material

8. Kakak Mawaddah Waromah, dan kakak Tika Puspita Sari, S.H selaku staff jurusan yang telah membantu dan memberi arahan serta masukan dalam memperlancar perkuliahan.
9. Sahabat saya Haikal Akbar, Ahmad Rizaldi, Wahyuni Hidayanti, Alfinah Fitriani, yang turut membantu dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa.
10. Seluruh rekan-rekan dan sahabat seperjuangan mahasiswa Siyasah – A angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberi dukungan untuk menuju kesuksesan di masa mendatang.

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tidak putus pahalanya dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 25 Agustus 2022

Penulis



ALVIAN KURNIAWAN

NIM. 0203181014

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kajian Terdahulu.....	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Hipotesis.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematis Penulisan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Peran PPNS SatPol PP.....	24
1. Defenisi Peran.....	24
2. Aspek Aspek Peran.....	25
3. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.....	27
B. Tertib Sosial.....	29
1. Defenisi Tertib Sosial.....	29
2. Pengaturan hukum tertib sosial dalam pelacuran, tindak asusila dan perselingkuhan di Kabupaten Asahan.....	30
3. Faktor penyebab terjadinya pelacuran, tindak asusila dan perselingkuhan.....	31
4. Dampak terjadinya pelacuran, tindak asusila dan perselingkuhan.....	34
5. Upaya penanggulangan pelacuran, tindak asusila dan perselingkuhan.....	35

C. Tinjauan Umum Perspektif Fiqih Siyasah Tentang Penegakan Hukum Tertib Sosial.....	37
a. Pengertian Fiqh Siyasah.....	37
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	38
a. Pengertian Siyasah Dusturiyah	40
b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	41
c. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Penegakan Hukum tertib Sosial Perselingkuhan, Tindak Asusila dan Perselingkuhan	43
BAB III GAMBARAN UMUM.....	47
A. Kabupaten Asahan.....	47
a) Kependudukan.....	51
b) Pendidikan.....	53
c) Agama	54
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum tertib sosial di Kabupaten Asahan.	58
B. Hambatan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam melakukan penegakan tertib sosial Pelacuran, Tindak asusila dan perselingkuhan	64
C. Tinjauan Fiqih Siyasah dalam melakukan penegakan tertib sosial Pelacuran, Tindak asusila dan perselingkuhan di Kabupaten Asahan.....	67
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pendidikan Penduduk Kabupaten Asahan.....	52
Tabel 1.2 Komposisi Pelaku Tindak Asusila Penyakit Masyarakat.....	59
Tabel 1.3 Daftar Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polissi Pamong Praja di Kabupaten Asahan	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Luas Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Asahan	48
Gambar 1.2 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan di Kabupaten Asahan	51
Gambar 1.3 Komposisi Agama Penduduk Kabupaten Asahan.....	53
Gambar 1.4 Komposisi Struktur Organisasi SatPol PP Kabupaten Asahan	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN